

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangan agar lebih transparan dan dapat dipercaya. Reformasi di bidang akuntansi pemerintahan diwujudkan melalui diberlakukannya PP No. 71 Tahun (2010). Aturan ini meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan metode akuntansi yang mendokumentasikan setiap transaksi keuangan, bukan hanya ketika uang diterima atau dibayarkan. Tujuannya adalah untuk membuat proses penyusunan dan penyebaran laporan keuangan pemerintah lebih terorganisir, mudah dipahami, dan selaras dengan aturan akuntansi yang tepat, sehingga masyarakat dapat memiliki informasi yang lebih jelas tentang bagaimana keuangan negara dikelola.

Baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, anggaran merupakan rencana keuangan yang dirancang untuk jangka waktu tertentu. Secara sederhana, anggaran adalah perencanaan keuangan yang dibuat secara sistematis oleh suatu instansi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Anggaran memiliki peran yang sangat penting karena menjadi alat manajemen untuk merencanakan program, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan aktivitas, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya anggaran, organisasi dapat mengendalikan operasionalnya secara lebih terarah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan desentralisasi di tingkat daerah, ditambah dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, mendorong pemerintah pusat maupun daerah guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya. Pemerintah dituntut menerapkan tata kelola keuangan yang lebih terbuka, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penggunaan anggaran benar-benar dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Desentralisasi di tingkat regional, bersamaan dengan meningkatnya seruan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan sistem manajemen

keuangan mereka. Pemerintah menginginkan manajemen keuangan lebih transparan, terorganisir, serta bertanggung jawab, memastikan bahwa uang digunakan dengan cara yang tepat, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, anggaran menjadi aspek yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Anggaran pada dasarnya merupakan perencanaan kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan konsep pembangunan atau program jangka panjang yang telah diputuskan sebelumnya. Melalui proses penganggaran inilah arah kebijakan dan prioritas pembangunan diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan dan alokasi dana yang lebih konkret.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengacu pada standar dan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga dapat menilai secara berkala tingkat efisiensi operasional suatu organisasi, struktur organisasinya, serta kinerja para pegawainya. Penilaian ini juga digunakan untuk mengukur sejauh mana manajer mampu menjalankan fungsi manajerialnya, seperti perencanaan, analisis, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengelolaan sumber daya, negosiasi, representasi, hingga pencapaian kinerja secara menyeluruh. Namun, pencapaian kinerja pemerintah secara menyeluruh tidak cukup hanya berfokus pada tahap penyusunan anggaran. Diperlukan peran aktif pimpinan daerah, khususnya manajemen pada instansi pengelola keuangan, dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif. Peran tersebut mencakup peran interpersonal, peran informasional, serta peran dalam pengambilan keputusan yang strategis dan tepat sasaran.

Menurut Annisa et al. (2022) Partisipasi anggaran (*budgeting participation*) merupakan mekanisme penyusunan anggaran yang memberikan kesempatan kepada manajer yang memiliki tanggung jawab atas pencapaian target anggaran untuk terlibat secara aktif dalam proses perumusannya. Dalam praktiknya, penyusunan anggaran menuntut adanya koordinasi secara efektif antara atasan dan bawahan. Anggaran yang dirancang melalui pendekatan partisipatif selanjutnya memperoleh persetujuan dari manajer pada masing-masing bidang hingga tingkat manajemen puncak, sehingga terbentuk pembagian tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi, yang dikenal sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban.

Penyelenggaraan penataan anggaran dimulai dari membentuk panitia penataan anggaran, lalu data diklasifikasikan dan disusun sesuai dengan agenda kegiatan fisik dan keuangan. Langkah berikutnya adalah setiap pimpinan divisi melaporkan kepada pimpinannya untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut. Manajer tertinggi membangun berbagai bidang yang dicoba.

Akuntansi pertanggungjawaban memiliki fungsi penting dalam menilai aktivitas organisasi beserta hasil yang dicapai, termasuk dalam pelaksanaan anggaran yang disusun berdasarkan pusat tanggung jawab tertentu. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilakukan secara akurat dan tepat memungkinkan organisasi memastikan kesesuaian realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja setiap unit kerja maupun kinerja perusahaan secara menyeluruh Rini et al., (2022).

Pemerintah Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022 hingga 2023. Opini tersebut sering dijadikan indikator untuk menilai apakah pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah dirancang berdasarkan standar yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat kerap memaknai opini WTP sebagai bukti bahwa pengelolaan keuangan telah sepenuhnya berjalan dengan baik dan bebas dari penyimpangan. Padahal, BPK sendiri berulang kali menegaskan bahwa opini WTP tidak menjamin suatu instansi terbebas dari praktik korupsi. Opini tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan profesional auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan penilaian menyeluruh atas integritas pengelolaan keuangan. Bahkan, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah daerah peraih opini WTP tetapi tetap menghadapi berbagai permasalahan dalam tata kelola keuangan pemerintahannya. Dengan demikian, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Kantor BPKAD Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

yang akan diuji sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor BPKAD Kabupaten Jember?
2. Apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor BPKAD Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Kantor BPKAD Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada Kantor BPKAD Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Mendapatkan wawasan mendalam mengenai Partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban di Pemerintah Daerah, khususnya di BPKAD Kabupaten Jember.
2. Bagi BPKAD Kabupaten Jember
Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada BPKAD khususnya kabupaten Jember .
3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini akan menjadi sumber daya bermanfaat lainnya untuk penelitian di masa mendatang dan membantu pembaca mempelajari lebih lanjut.